



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

PERUBAHAN RENCANA KERJA



**20
25**



bapenda@jombangkab.go.id



<https://bapenda.jombangkab.go.id>



@bapendajombang

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025.

Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam penyusunan anggaran dalam hal ini Rencana Kinerja (Renja) 2025.

Besar harapan kami bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Jombang menuju pembangunan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 ini mampu meningkatkan kinerja peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

Jombang, 17 Juni 2025



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

HARTONO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691002 198903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Rencana Kerja 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD..... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 12

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 18

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 26

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 30

3.2 Tujuan dan Sasaran 34

3.3 Program dan Kegiatan..... 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41

4.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan..... 41

BAB V PENUTUP 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Sebagai penjabaran Renstra OPD, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menindaklanjuti evaluasi kinerja anggaran, maka dilakukan penyesuaian anggaran dan perlu disusun Rencana Kerja Perubahan OPD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan evaluasi pada pertengahan tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD tetap berpedoman pada Review Renstra OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2025, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan pendapatan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 berlandaskan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025;
22. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 000.7.2/214/415.01/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan kembali arah kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai respon terhadap dinamika pelaksanaan program selama tahun berjalan.
2. Mengakomodasi perubahan yang terjadi, baik dari sisi regulasi, kebijakan nasional/daerah, hasil evaluasi kinerja, maupun perkembangan situasi dan kondisi aktual.
3. Memberikan pedoman operasional dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan instansi agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan prioritas nasional.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin Konsistensi dan Sinkronisasi

Menyelaraskan antara Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Pagu Anggaran Perubahan APBD Tahun 2025.

2. Mengakomodasi Perubahan Kebijakan atau Prioritas Pembangunan
Menyesuaikan program dan kegiatan dengan perubahan arah kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang terjadi di tengah tahun berjalan.
3. Menindaklanjuti Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I
Menyesuaikan target dan strategi berdasarkan hasil evaluasi semester pertama, termasuk perbaikan terhadap capaian kinerja yang belum optimal.
4. Menyesuaikan dengan Kondisi Aktual dan Kebutuhan Masyarakat
Menanggapi kondisi darurat, kebutuhan mendesak, atau dinamika sosial-ekonomi yang memerlukan penyesuaian kegiatan dan pembiayaan.
5. Mendukung Efektivitas Penggunaan Anggaran
Mengoptimalkan alokasi anggaran perubahan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Rencana Kerja

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Rencana Kerja

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam proses evaluasi kinerja tahunan guna menilai sejauh mana program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja perubahan serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi capaian output kegiatan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia, sehingga pelaksanaan program di triwulan berikutnya dapat lebih terarah dan optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jombang. Sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut telah dilaksanakan melalui program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 dengan rincian 2 (dua) Program dan 7 (Tujuh) Kegiatan.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya kegiatan launching SPPT PBB-P2 yang disertai penyerahan Dokumen Hasil Ketetapan Pajak (DHKP) kepada Kepala Desa dan Camat;
- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan;
- c. Terlaksananya pelayanan pembayaran pajak daerah diluar kantor dengan nama kegiatan LAYAR JEBOL (Pelayanan Pembayaran Pajak Jemput Bola);
- d. Terlaksananya pendataan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Terlaksananya pemutakhiran data wajib pajak daerah;
- f. Terlaksananya kegiatan penagihan pajak daerah dan monitoring evaluasi PBB-P2 untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang;
- g. Terlaksananya penetapan serta penerbitan data pajak daerah;

- h. Terlaksananya pemasangan alat perekam transaksi (E-Tax) di wajib pajak restoran, hotel, dan parkir.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 secara umum berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Beberapa kegiatan yang memerlukan dukungan teknis dan operasional mengalami keterlambatan pelaksanaan akibat proses pengadaan yang belum selesai pada awal triwulan. Perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi juga mempengaruhi pelaksanaan proses pengadaan terkait ATM QRIS Opsen PKB/BBNKB.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Masih Rendah

Kesadaran sebagian wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah masih belum optimal, sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

3. Kurangnya Optimalisasi PAD dari Sektor Retribusi Daerah

Beberapa jenis retribusi dan pajak memerlukan sinergi dengan perangkat daerah teknis lain dalam Optimalisasi Potensi Retribusi Daerah, yang belum sepenuhnya berjalan efektif pada awal tahun.

4. Kendala Lapangan dalam Kegiatan Pendataan dan Penagihan

Resistensi dari wajib pajak tertentu menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan intensifikasi seperti verifikasi lapangan dan penagihan aktif.

5. Penyesuaian Regulasi dan Kebijakan Baru

Perubahan kebijakan dari pusat atau daerah yang belum sepenuhnya tersosialisasi menyebabkan perlambatan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, termasuk penyusunan regulasi turunan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah telah merumuskan sejumlah langkah strategis dan operasional guna memastikan keberlanjutan serta peningkatan capaian kinerja. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Melakukan koordinasi intensif dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Tim Infrastruktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur guna mempercepat proses pengadaan yang mendukung kegiatan operasional, termasuk percepatan penunjukan penyedia dan penyelesaian administrasi.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Melakukan pemeliharaan berkala dan peningkatan kapasitas sistem informasi pajak daerah agar lebih andal dan responsif, serta menyediakan kanal bantuan teknis jika terjadi gangguan dalam penggunaan sistem oleh petugas atau wajib pajak.
3. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak
Melaksanakan sosialisasi intensif kepada wajib pajak melalui media sosial, penyuluhan lapangan, dan kolaborasi dengan pihak ketiga guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah.
4. Penguatan Koordinasi Antar Perangkat Daerah
Mengintensifkan forum koordinasi lintas perangkat daerah, terutama untuk mendukung pemutakhiran data potensi pajak, pengelolaan retribusi, serta integrasi pelayanan publik yang berdampak pada penerimaan PAD.
5. Penguatan Penagihan Aktif
Meningkatkan efektivitas kegiatan penagihan langsung terutama PBB-P2 melalui monitoring evaluasi dengan Camat dan Kepala Desa, Uji Petik kepada WP yang memiliki tunggakan dan pelaksanaan penagihan *door to door* melalui pengiriman surat tagihan.
6. Respons Cepat terhadap Perubahan Kebijakan
Membentuk tim kecil untuk mengkaji dan membuat konsep perubahan peraturan daerah sesuai dengan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk melakukan revisi teknis yang diperlukan dalam peraturan pelaksanaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan yang terjadi pada Triwulan I dapat diminimalkan, dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II dan seterusnya dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil Evaluasi pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Triwulan I adalah digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan PD Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 TW I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100	107,50	100	13,19	13,19	100	120,69	120,69
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	466.674.950.000	207.379.735.020	312.372.602.400	38.392.865.304	12,29	312.372.602.400	245.772.600.324	52,66
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	2.091.000	767.642	697.000	768.143	110,21	697.000	1.535.785	73,45
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	466.674.950.000	207.379.735.020	312.372.602.400	38.392.865.304	12,29	312.372.602.400	245.772.600.324	52,66
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	1.365.400.000.000	391.085.741.764	450.800.000.000	60.226.966.763	13,36	450.800.000.000	451.312.708.527	33,05
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12	4	4	1	25,00	4	5	41,67
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	36	12	12	3	25,00	12	15	41,67
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	36	12	12	3	25,00	12	15	41,67
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2.079.000	767.642	697.000	768.143	110,21	697.000	1.535.785	73,87
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12.000	6.950	4.000	2.157	53,93	4.000	9.107	75,89

Rencana Kerja Perubahan 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	36	12	12	3	25,00	12	15	41,67
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	36	12	12	3	25,00	12	15	41,67
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	36	12	12	3	25,00	12	15	41,67
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	100	101,72	90	121,68	135,20	90	223	223,40
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100	100	100	25	25,00	100	125	125,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3	3	3	-	0,00	3	3	100,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	9	9	9	3	33,33	9	12	133,33
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100	100	100	22	21,62	100	122	121,62
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	70	61	61	100,00	61	131	62,38
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	12	12	3	25,00	12	15	41,67
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	1	1	-	0,00	1	1	33,33
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	100	97	100	-	-	100	97	97,25
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	261	87	61	-	-	61	87	33,33

Rencana Kerja Perubahan 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	15	-	3	-	-	3	-	0,00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270	90	90	-	-	90	90	33,33
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100	100	100	18	18,25	100	118	118,25
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	19	6	31,58	19	7	233,33
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1	61	3	4,92	61	4	133,33
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	1	12	3	25,00	12	4	133,33
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	1	12	3	25,00	12	4	16,67
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	51	17	11	3	27,27	11	20	39,22
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	48	2	3	150,00	2	51	35,42
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	8	9	2	22,22	9	10	37,04
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100	100	100	25	25,00	100	125	125,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	3	25,00	12	15	41,67
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	3	25,00	12	15	41,67
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100	100	100	23	23,44	100	123	123,44

5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	99	32	31	8	25,81	31	40	40,40
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1	18	-	0,00	18	1	33,33
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	74	21	15	7	46,67	15	28	37,84

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan. Tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, dapat dilaksanakan melalui beberapa aspek/fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;
- b. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang difokuskan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah Pendapatan yaitu melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Penetapan dan penerbitan data potensi, serta pengendalian dan pelaporan penerimaan PAD secara tertib melalui pelayanan dasar dan pelayanan penunjang sesuai RPJMD;
- d. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan yang difokuskan pada Peraturan Bupati terkait Pendapatan Daerah yang perlu ditindaklanjuti;
- e. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD;
- f. Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, dan Peningkatan PAD dari tahun sebelumnya;
- g. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat yang difokuskan pada bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsifitas terhadap partisipasi masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan.

Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2022 s.d 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

No	Uraian	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022		Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023		Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	
		Rp	Rp.	%	Rp	Rp.	%	Rp	Rp.	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	135.421.000.000,00	172.199.090.357,00	127,16	163.627.000.000,00	185.969.721.019,00	113,65	194.080.000.000,00	207.379.735.020,00	106,85
2	Hasil Retribusi Daerah	17.491.649.455,00	20.625.241.069,53	117,91	19.862.764.623,00	24.642.310.018,00	124,06	17.732.270.723,00	21.042.867.495,96	118,67
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.924.141.742,89	4.917.041.528,56	99,86	7.308.019.425,00	5.778.730.454,51	79,07	7.384.450.497,00	7.283.403.750,66	98,63
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	307.713.781.892,08	324.440.063.150,58	105,44	361.840.818.680,00	411.768.856.235,85	113,80	365.778.434.092,00	399.808.214.791,98	109,30
	JUMLAH	465.550.573.089,97	522.181.436.105,67	112,16	552.638.602.728,00	628.159.617.727,36	113,67	584.975.155.312,00	635.514.221.058,60	108,64

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	n/a	n/a	3,5	3,75	100	100	107,5	13,19	100	100	
2	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	n/a	n/a	1,15	1,25	152.891.650.000	294.164.752.400	207.379.735.020,00	38.392.865.304	312.372.602.400	312.372.602.400	Pada tahun 2022 - 2023 terdapat perbedaan indikator dikarenakan masih berpedoman pada Renstra 2019 - 2023
3	Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	n/a	n/a	688.000	691.000	694.000	697.000	767.642	768.143	697.000	700.000	
4	Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	n/a	n/a	135.470.000.000	147.820.050.000	152.891.650.000	294.164.752.400	207.379.735.020	38.392.865.304	312.372.602.400	312.372.602.400	
5	Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	413.800.000.000	450.800.000.000	391.085.741.763,62	60.226.966.763,49	450.800.000.000	500.800.000.000	
6	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	4	4	4	1	4	4	
7	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	n/a	n/a	8	12	12	12	12	3	12	12	
8	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	n/a	n/a	n/a	12	12	12	12	3	12	12	

9	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	n/a	n/a	688.000	691.000	692.000	693.000	767.642	768.143	697.000	694.000	
10	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	3,5	4.000	6950	2157	4000	4.500	
11	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	12	12	12	12	3	12	12	
12	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	12	12	12	12	3	12	12	
13	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	12	3	12	12	
14	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	n/a	n/a	90	90	90	90	101.45	121,68	90	100	
15	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	n/a	n/a	100	100	100	100	100	25	100	100	
16	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	n/a	n/a	3	3	3	3	3	0	3	3	
17	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	n/a	n/a	6	12	9	9	9	3	9	9	
18	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	n/a	n/a	100	100	100	100	100	21,62	100	100	
19	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	n/a	1118	70	70	1118	61	61	70	
20	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	12	12	12	12	12	3	12	12	
21	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	0	1	1	

22	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	0	100	100	
23	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	87	87	n/a	0	61	87	
24	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	n/a	0	3	5	
25	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	90	90	n/a	0	90	90	
26	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	18,25	100	100	
27	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	2	1	1	2	6	19	1	
28	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	7	1	1	7	3	61	1	
29	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	3	12	1	
30	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	8	1	1	8	3	12	8	
31	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	3	17	17	3	3	11	17	
32	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a	48	48	48	48	48	3	2	48	
33	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	7	12	8	9	12	2	9	10	
34	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	n/a	n/a	100	100	100	100	100	25	100	100	
35	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	n/a	12	12	12	12	12	3	12	12	

36	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	12	12	12	12	3	12	12	
37	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	n/a	n/a	100	100	100	100	100	23,44	100	100	
38	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a	31	36	32	33	36	8	31	34	
39	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	1	1	1	1	1	0	18	1	
40	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	20	20	21	24	20	7	15	29	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya.

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah:

1. Penyusunan Target PAD belum berdasarkan potensi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.
Target terkadang disusun tanpa basis data potensi yang akurat, sehingga kurang realistis.
2. Masih Bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat
PAD masih menjadi sumber penerimaan minor dibandingkan Dana Transfer (DAU, DAK, DBH). Ketergantungan ini membuat daerah kurang fleksibel dalam pembiayaan pembangunan lokal.
3. Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Rendah
Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah masih terbatas. Sosialisasi belum masif, dan sanksi administratif tidak dijalankan secara tegas.
4. Belum Optimalnya Ekstensifikasi dan Intensifikasi
Pendataan potensi objek pajak belum menyeluruh, sehingga banyak potensi belum tergali. Penagihan belum berjalan efektif, dan sistem insentif bagi petugas masih lemah.
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah masih kekurangan dalam hal jumlah maupun kompetensi teknis. Minimnya pelatihan dan pembinaan teknis dalam bidang perpajakan daerah.
6. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sistem informasi pajak daerah (e-pajak, e-retribusi) belum terintegrasi dan kadang belum berjalan maksimal. Banyak proses masih dilakukan secara manual, rentan terhadap kebocoran atau keterlambatan.
7. Kendala Regulasi dan Penyesuaian Tarif
Beberapa Perda tentang pajak dan retribusi belum diperbarui sesuai dengan UU HKPD (UU No. 1 Tahun 2022). Proses revisi regulasi seringkali memerlukan waktu panjang karena melibatkan banyak pihak.
8. Tingginya Kebocoran Potensi PAD
Masih ditemukan praktik kebocoran dalam penarikan retribusi langsung. Pengawasan internal belum optimal dan sistem pengendalian belum ketat
9. Terbatasnya Inovasi dan Diversifikasi Sumber PAD

PAD masih didominasi dari sektor tertentu (seperti pajak kendaraan bermotor, PBB).

Sektor-sektor baru, seperti digital economy, wisata, dan jasa lokal belum banyak digarap. Dengan demikian kesimpulan dari Isu strategis di atas adalah **Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.**

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Basis Data dan Pemetaan Potensi PAD
 - Melakukan pemutakhiran dan integrasi data wajib pajak dan objek pajak secara berkala.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan GIS untuk memetakan potensi PAD berbasis wilayah dan sektor ekonomi.
 - Melibatkan perangkat daerah teknis dalam pendataan lintas sektor (usaha, pariwisata, parkir, reklame, dll).
2. Meningkatkan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak
 - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara masif dan terjadwal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
 - Mengembangkan sistem peringatan otomatis (notifikasi jatuh tempo) dan pemberian insentif bagi WP patuh.
 - Meningkatkan penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif yang tegas bagi WP yang melanggar.
3. Percepatan Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan
 - Membangun dan memperluas penggunaan aplikasi e-pajak, e-retribusi, dan sistem pembayaran non-tunai.
 - Mengintegrasikan layanan pajak dengan kanal digital seperti QRIS, dompet digital, dan perbankan daerah.
 - Menyediakan pelayanan pajak online yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel.
4. Penguatan Kapasitas SDM Pengelola PAD
 - Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pemungut dan analisis pendapatan.
 - Memberikan insentif berbasis kinerja kepada tim pemungut PAD yang mencapai atau melampaui target.
 - Meningkatkan jumlah personel lapangan, khususnya di bidang pendataan dan penagihan.
5. Reformasi Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah

- Melakukan reviu dan revisi Perda serta Perkada tentang pajak dan retribusi agar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD).
 - Menyesuaikan tarif pajak dan retribusi secara berkala berdasarkan kemampuan masyarakat dan potensi sektor.
6. Diversifikasi Sumber-Sumber PAD Baru
- Mengembangkan potensi PAD dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, digital economy, dan pemanfaatan aset daerah.
 - Mendorong pemanfaatan aset daerah yang idle menjadi sumber pendapatan produktif (sewa, kerja sama pemanfaatan, dll).
7. Peningkatan Koordinasi Antar OPD dan Stakeholder
- Membentuk tim terpadu pemungutan PAD yang melibatkan Bapenda, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Perizinan, dan lainnya.
 - Mendorong kerja sama dengan BUMD, swasta, dan pihak ketiga dalam kegiatan intensifikasi dan perluasan basis pajak.
8. Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebocoran
- Menerapkan sistem audit internal secara berkala terhadap proses pemungutan dan pelaporan.
 - Memanfaatkan CCTV, GPS tracking, dan pelaporan online untuk mengurangi potensi penyimpangan di lapangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan anggaran sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan anggaran yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Nama Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator/Keluaran	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Lokasi	Usulan Anggaran (Rp.)	Prakiraan Maju 2025	Nama Program/Kegiatan/ n/Sub. Kegiatan	Indikator/Keluaran	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Lokasi	Usulan Anggaran (Rp.)	Prakiraan Maju 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	Bapenda	7.974.950.340	7.974.950.340	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	Bapenda	7.974.950.340	7.974.950.340
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Rp 155.391.650.000	Bapenda	778.365.000	778.365.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Rp 155.391.650.000	Bapenda	778.365.000	778.365.000
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	697.000 OP	Bapenda	3.984.021.825	3.984.021.825		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	697.000 OP	Bapenda	3.984.021.825	3.984.021.825
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Rp 155.391.650.000	Bapenda	2.950.063.515	2.950.063.515		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Rp 155.391.650.000	Bapenda	2.950.063.515	2.950.063.515
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Rp 450.800.000.000	Bapenda	262.500.000	262.500.000		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Rp 450.800.000.000	Bapenda	262.500.000	262.500.000
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	Bapenda	315.000.000	315.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	Bapenda	315.000.000	315.000.000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	Bapenda	3.573.150.000	3.573.150.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	Bapenda	3.573.150.000	3.573.150.000

Rencana Kerja Perubahan 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12 laporan	Bapenda	376.845.000	376.845.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12 laporan	Bapenda	376.845.000	376.845.000
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	693.000 dokumen	Bapenda	410.871.825	410.871.825	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	693.000 dokumen	Bapenda	410.871.825	410.871.825
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.000 layanan	Bapenda	236.250.000	236.250.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.000 layanan	Bapenda	236.250.000	236.250.000
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	Bapenda	2.713.813.515	2.713.813.515	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	Bapenda	2.713.813.515	2.713.813.515
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	Bapenda	86.520.000	86.520.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	Bapenda	86.520.000	86.520.000
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	Bapenda	262.500.000	262.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	Bapenda	262.500.000	262.500.000
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	90%	Bapenda	15.357.344.285	15.357.344.285	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	90%	Bapenda	15.357.344.285	15.357.344.285
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	Bapenda	35.171.000	35.171.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	Bapenda	35.171.000	35.171.000
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	Bapenda	25.000.000	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	Bapenda	25.000.000	25.000.000
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	9 laporan	Bapenda	10.171.000	10.171.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	9 laporan	Bapenda	10.171.000	10.171.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100%	Bapenda	12.917.028.300	12.917.028.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100%	Bapenda	12.917.028.300	12.917.028.300

Rencana Kerja Perubahan 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	Bapenda	12.405.283.000	12.405.283.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	Bapenda	12.405.283.000	12.405.283.000
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Bapenda	508.995.300	508.995.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Bapenda	508.995.300	508.995.300
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Bapenda	2.750.000	2.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Bapenda	2.750.000	2.750.000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	100%	Bapenda	168.620.000	168.620.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	100%	Bapenda	168.620.000	168.620.000
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87 paket	Bapenda	26.100.000	26.100.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87 paket	Bapenda	26.100.000	26.100.000
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 orang	Bapenda	50.000.000	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 orang	Bapenda	50.000.000	50.000.000
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	Bapenda	92.520.000	92.520.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	Bapenda	92.520.000	92.520.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100%	Bapenda	975.667.165	975.667.165	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100%	Bapenda	975.667.165	975.667.165
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	13.041.380	13.041.380	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	13.041.380	13.041.380
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	506.000.000	506.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	506.000.000	506.000.000

Rencana Kerja Perubahan 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

5.02.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Bapenda	2.821.500	2.821.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Bapenda	2.821.500	2.821.500
5.02.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	275.007.260	275.007.260	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	275.007.260	275.007.260
5.02.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	Bapenda	140.411.425	140.411.425	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	Bapenda	140.411.425	140.411.425
5.02.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 dokumen	Bapenda	11.682.000	11.682.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 dokumen	Bapenda	11.682.000	11.682.000
5.02.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	Bapenda	26.703.600	26.703.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	Bapenda	26.703.600	26.703.600
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	Bapenda	964.889.420	964.889.420	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	Bapenda	964.889.420	964.889.420
5.02.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Bapenda	226.820.000	226.820.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Bapenda	226.820.000	226.820.000
5.02.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Bapenda	738.069.420	738.069.420	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Bapenda	738.069.420	738.069.420
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100%	Bapenda	295.968.400	295.968.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100%	Bapenda	295.968.400	295.968.400
5.02.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 kendaraan	Bapenda	157.590.400	157.590.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 kendaraan	Bapenda	157.590.400	157.590.400

	Operasional atau Lapangan						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Bapenda	39.543.000	39.543.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Bapenda	39.543.000	39.543.000
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 sarana	Bapenda	98.835.000	98.835.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 sarana	Bapenda	98.835.000	98.835.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum SKPD Kabupaten, maka ditetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 27.686.311.796,00. Usulan program dan kegiatan – kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Program Sosialisasi dan Edukasi Pajak Daerah kepada Masyarakat
Kegiatan: Seminar, penyuluhan, dan pelatihan tentang pentingnya membayar pajak daerah (PBB, pajak restoran, reklame, dll)
Tujuan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.
Pelaksana: Bapenda bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat.
2. Peningkatan Layanan Pembayaran Pajak di Tingkat Desa/Kelurahan
Kegiatan: Pengadaan layanan mobil keliling pajak daerah, ATM pajak, atau loket pelayanan terpadu di desa/kelurahan.
Tujuan: Mempermudah akses masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
Pelaksana: Bapenda dan pemerintah desa/kelurahan.
3. Pelaporan Mandiri Objek Pajak via Aplikasi
Kegiatan: Pemberdayaan masyarakat dalam pelaporan objek pajak secara mandiri melalui aplikasi e-pajak atau website resmi.
Tujuan: Membantu pemutakhiran data secara partisipatif dan mempercepat layanan.
Pelaksana: Bapenda, Diskominfo, dengan pendampingan dari perangkat desa/kelurahan.
4. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pajak dan Retribusi
Kegiatan: Membuka kanal pelaporan masyarakat terhadap potensi kebocoran pajak/retribusi (misalnya parkir liar, reklame ilegal).
Tujuan: Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemungutan PAD.
Pelaksana: Bapenda dan Inspektorat Daerah.

Tabel 2.5
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kabupaten Jombang

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	Bapenda	100%	8.891.194.351	APBD 2025
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Bapenda	Rp312.372.602.400	1.873.471.222	APBD 2025
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Bapenda	697.000 objek pajak	2.177.337.286	APBD 2025
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Bapenda	Rp312.372.602.400	4.791.656.218	APBD 2025
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Bapenda	Rp450.800.000.000	48.729.625	APBD 2025
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	4 dokumen	1.047.699.472	APBD 2025
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12 laporan	1.527.333.236	APBD 2025
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Bapenda	12 laporan	700.507.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	697.000 dokumen	650.004.050	APBD 2025
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	4.000 layanan	331.084.570	APBD 2025
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	4.460.571.648	APBD 2025
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	125.264.750	APBD 2025

5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	12 laporan	48.729.625	APBD 2025
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	Bapenda	90%	18.795.117.445	APBD 2025
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Bapenda	100%	15.809.000	APBD 2025
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Bapenda	3 dokumen	9.620.000	APBD 2025
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Bapenda	9 laporan	6.189.000	APBD 2025
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Bapenda	100%	15.469.737.114	APBD 2025
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	61 orang/bulan	15.043.648.114	APBD 2025
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	12 dokumen	424.512.000	APBD 2025
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1 laporan	1.577.000	APBD 2025
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Bapenda	100%	217.055.409	APBD 2025
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda	61 paket	22.655.400	APBD 2025
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Bapenda	3 orang	167.774.318	APBD 2025
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	90 orang	26.625.691	APBD 2025
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Bapenda	100%	1.610.932.394	APBD 2025
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	19 paket	21.829.150	APBD 2025

5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	61 paket	1.182.353.644	APBD 2025
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	12 paket	14.638.700	APBD 2025
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 paket	244.108.100	APBD 2025
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	11 paket	41.101.800	APBD 2025
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	24 dokumen	11.760.000	APBD 2025
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	9 laporan	95.141.000	APBD 2025
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	523.000.932	APBD 2025
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	309.520.000	APBD 2025
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	213.480.932	APBD 2025
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	958.582.596	APBD 2025
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	33 unit	261.320.000	APBD 2025
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	501.328.596	APBD 2025
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	15 unit	195.934.000	APBD 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Renstra dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD.

Visi RPJPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode 2025-2045 adalah “ Jawa Timur Berakhlak, Maju, Berdaya saing global, sejahtera, dan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial yang inklusif
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
5. Pembangunan kewilayahan dan penyediaan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran berdasarkan rumusan diatas, maka dilaksanakan 2 (dua) strategi umum sebagai berikut:

1. Implementasi sistem meretokratik, complaint handling system, membangun birokrasi anti korupsi dan penguatan SPIP;
2. Mendorong sound governance, pelayanan berbasis IT, implementasi e-government guna pemanfaatan data pembangunan secara optimal;

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan diatas, maka dukungan utama yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui pemungutan PAD secara akuntabel dan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran Pajak. Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun aspek teknis administrasi. Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Seiring dengan proses pemilihan kepala daerah serentak di seluruh daerah otonom di Indonesia pada tahun 2024, telah terpilih kepala daerah baru, tidak terkecuali di Kabupaten Jombang. H. Warsubi, S.H. M.Si. dan K.H. Salmanuddin Yazid S.Ag., M.Pd. telah terpilih dan bahkan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2025-2030. Visi, misi serta program prioritas (janji politik) kepala daerah selanjutnya harus memiliki keterkaitan ke dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Visi pembangunan daerah bersumber dari Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu jabatan 5 tahun ke depan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode Renstra 2025-2030 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Visi tersebut menggambarkan harapan bahwa Kabupaten Jombang pada masa yang akan datang (tahun 2029) telah mengalami kemajuan di berbagai bidang yang mengindikasikan kesejahteraan untuk semua atau untuk seluruh masyarakat Jombang tanpa terkecuali. Penjelasan visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam dua pokok visi berikut:

1. **“Maju”**, mengandung makna kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Jombang yang cerdas, berdaya saing, berbudaya, religius, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu terlibat aktif dalam proses pembangunan serta transformasi sosial yang inklusif, harmonis dan berkelanjutan.
2. **“Sejahtera”**, bermakna kondisi Kabupaten Jombang di akhir periode jangka menengah terpenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, ditandai dengan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat, ketahanan sosial, peningkatan

kualitas kehidupan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan transformatif yang bersih dan melayani, efektif dan efisien, serta transparan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 harus mendukung tercapainya visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan, maka misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berbudi Pekerti Luhur, Religius dan Berdaya Saing Global.** Misi ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Jombang yang mampu mendukung proses transformasi sosial yang inklusif, adaptif dan inovatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fokus dari penyelenggaraan misi ini adalah pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial lainnya, termasuk di dalamnya penurunan kemiskinan dan perlindungan masyarakat dari bencana.
2. **Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan.** Misi ini diselenggarakan melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi sumber daya ekonomi unggulan berbasis teknologi, meningkatkan kontribusi sektor strategis, penciptaan ekonomi kreatif, bisnis rintisan start up dan marketplace. Misi ini menekankan implementasi Ekonomi Hijau (green economy) yang berarti tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Konsepnya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam, yang antara lain diterapkan melalui pendekatan ekonomi sirkular yang menekankan nilai produk atau bahan selama mungkin untuk menekan limbah. Orientasi misi ini adalah integrasi sektor industri, perdagangan dengan sektor pertanian, penguatan investasi daerah dan meningkatnya ekonomi masyarakat yang ditandai berkembangnya koperasi, usaha mikro, ekonomi kreatif yang dapat memperkecil kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.
3. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.** Misi ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas dan berwawasan lingkungan, baik infrastruktur kawasan permukiman, pekerjaan umum maupun perhubungan. Arah pengembangan infrastruktur difokuskan pada; (1) pemenuhan infrastruktur wajib dasar; (2) kawasan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru; (3) pengembangan infrastruktur jalan yang berdampak pada peningkatan

aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Misi ini juga berfokus pada upaya-upaya menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga diharapkan mampu memitigasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan rendahnya/menurunnya kualitas lingkungan hidup.

4. **Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal.** Misi ini diselenggarakan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman, nyaman dan menghargai perbedaan (harmoni sosial). Pembangunan ketahanan sosial, khususnya pada penciptaan masyarakat yang agamis, tertib, tentram dan terlindungi serta rukun menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini. Pembangunan budaya dan kesetaraan gender juga merupakan fokus lainnya dari misi ini.
5. **Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.** Transformasi tata kelola pemerintahan ini diselenggarakan melalui transformasi digital dan perluasan partisipasi publik. Fokus penyelenggaraan dari misi adalah pada perluasan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui digitalisasi atau optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalamnya. Selain itu, menciptakan kebijakan publik dan membangun perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, serta aparatur sipil negara yang profesional, juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 tersebut diharapkan menjawab semua isu strategis pembangunan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mendukung misi bupati yang ke 5 (lima) yaitu **“Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif”** dengan indikator **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Berbasis Digital**. Dalam rangka mendukung misi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis digital, Badan Pendapatan Daerah melalui **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** merancang rencana kerja yang berfokus pada transformasi digital dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan berbasis elektronik, termasuk integrasi layanan pajak daerah secara online, penerapan kanal pembayaran non-tunai, serta optimalisasi dashboard pemantauan realisasi PAD secara real-time. Selain itu, dilakukan pula penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan literasi digital bagi petugas pemungut pajak dan operator sistem. Melalui sinergi antar-

perangkat daerah, Bapenda Jombang juga mendorong integrasi data perpajakan dengan instansi lain seperti DPMPTSP, Dukcapil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas PUPR untuk mendukung kebijakan satu data dan memperluas basis potensi penerimaan. Dengan langkah-langkah tersebut, Bapenda berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses administrasi, memperkuat transparansi publik, dan secara langsung mendukung pencapaian visi pemerintahan berbasis digital yang modern dan responsif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 merupakan penjabaran rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah serta kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui ketangguhan keuangan daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$X = \frac{(\text{Realisasi PAD tahun } n) - (\text{Realisasi PAD tahun } n - 1)}{(\text{Realisasi PAD tahun } n - 1)} \times 100\%$
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP tahun n
		Terlaksananya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	$X = \frac{\text{Realisasi PAD tahun } n}{\text{Target PAD tahun } n} \times 100\%$
		Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase Rata – rata capaian Kinerja aparatur sipil negara	$X = \frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh pegawai}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2030

No.	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			K	K	K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	Angka	0,00423	0,00432	0,00440	0,00449	0,00458	0,00467	
2	Rasio PAD terhadap PDRB	Angka	0,01297	0,01323	0,01349	0,01376	0,01404	0,01432	
3	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	21,66%	22,09%	22,54%	22,99%	23,45%	23,92%	
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	8,52%	8,94%	9,39%	9,86%	10,35%	10,87%	
5	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Persen	81	82	82,5	83	83,5	84	
7	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	

3.3 Program dan Kegiatan

Anggaran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Renja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 25.193.892.815,00 melalui 2 (dua) Program, 7 (tujuh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub. kegiatan yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator/Keluaran
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur sipil negara
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Dari uraian tersebut diatas dapat di lihat pada rincian tabel matriks Rencana kerja (Renja) tahun 2025, berikut ini :

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cata tan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	Bapenda	100%	8.891.194.351	APBD 2025		100%	9.335.754.069
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Bapenda	Rp312.372.602.400	1.873.471.222	APBD 2025		Rp322.372.602.400	1.967.144.783
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Bapenda	697.000 objek pajak	2.177.337.286	APBD 2025		700.000 objek pajak	2.286.204.150
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Bapenda	Rp312.372.602.400	4.791.656.218	APBD 2025		Rp322.372.602.400	5.031.239.029
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Bapenda	Rp450.800.000.000	48.729.625	APBD 2025		Rp470.800.000.000	51.166.106
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	4 dokumen	1.047.699.472	APBD 2025		4 dokumen	1.100.084.446
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12 laporan	1.527.333.236	APBD 2025		12 laporan	1.603.699.898
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Bapenda	12 laporan	700.507.000	APBD 2025		12 laporan	735.532.350
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	697.000 dokumen	650.004.050	APBD 2025		700.000 dokumen	682.504.253
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	4.000 layanan	331.084.570	APBD 2025		4.000 layanan	347.638.799
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	4.460.571.648	APBD 2025		12 dokumen	4.683.600.230
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	125.264.750	APBD 2025		12 dokumen	131.527.988

5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	12 laporan	48.729.625	APBD 2025		12 laporan	51.166.106
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	Bapenda	90%	18.795.117.445	APBD 2025		90%	19.734.873.317
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Bapenda	100%	15.809.000	APBD 2025		100%	16.599.450
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Bapenda	3 dokumen	9.620.000	APBD 2025		3 dokumen	10.101.000
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Bapenda	9 laporan	6.189.000	APBD 2025		9 laporan	6.498.450
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Bapenda	100%	15.469.737.114	APBD 2025		100%	16.243.223.970
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	61 orang/bulan	15.043.648.114	APBD 2025		61 orang/bulan	15.795.830.520
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	12 dokumen	424.512.000	APBD 2025		12 dokumen	445.737.600
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1 laporan	1.577.000	APBD 2025		1 laporan	1.655.850
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Bapenda	100%	217.055.409	APBD 2025		100%	227.908.179
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda	61 paket	22.655.400	APBD 2025		61 paket	23.788.170
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Bapenda	3 orang	167.774.318	APBD 2025		3 orang	176.163.034
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	90 orang	26.625.691	APBD 2025		90 orang	27.956.976
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Bapenda	100%	1.610.932.394	APBD 2025		100%	1.691.479.014

5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	19 paket	21.829.150	APBD 2025		19 paket	22.920.608
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	61 paket	1.182.353.644	APBD 2025		61 paket	1.241.471.326
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	12 paket	14.638.700	APBD 2025		12 paket	15.370.635
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 paket	244.108.100	APBD 2025		12 paket	256.313.505
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	11 paket	41.101.800	APBD 2025		11 paket	43.156.890
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	2 dokumen	11.760.000	APBD 2025		2 dokumen	12.348.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	9 laporan	95.141.000	APBD 2025		9 laporan	99.898.050
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	523.000.932	APBD 2025		100%	549.150.979
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	309.520.000	APBD 2025		12 laporan	324.996.000
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	213.480.932	APBD 2025		12 laporan	224.154.979
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	958.582.596	APBD 2025		100%	1.006.511.726
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	33 unit	261.320.000	APBD 2025		33 unit	274.386.000
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	501.328.596	APBD 2025		1 unit	526.395.026
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	15unit	195.934.000	APBD 2025		15unit	205.730.700

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan

Seiring dengan proses pemilihan kepala daerah serentak di seluruh daerah otonom di Indonesia pada tahun 2024, telah terpilih kepala daerah baru, tidak terkecuali di Kabupaten Jombang. H. Warsubi, S.H. M.Si. dan K.H. Salmanuddin Yazid S.Ag., M.Pd. telah terpilih dan bahkan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2025-2030. Visi, misi serta program prioritas (janji politik) kepala daerah selanjutnya harus memiliki keterkaitan ke dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Visi pembangunan daerah bersumber dari Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu jabatan 5 tahun ke depan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode Renstra 2025-2030 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Visi tersebut menggambarkan harapan bahwa Kabupaten Jombang pada masa yang akan datang (tahun 2029) telah mengalami kemajuan di berbagai bidang yang mengindikasikan kesejahteraan untuk semua atau untuk seluruh masyarakat Jombang tanpa terkecuali. Penjelasan visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam dua pokok visi berikut:

3. **“Maju”**, mengandung makna kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Jombang yang cerdas, berdaya saing, berbudaya, religius, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu terlibat aktif dalam proses pembangunan serta transformasi sosial yang inklusif, harmonis dan berkelanjutan.
4. **“Sejahtera”**, bermakna kondisi Kabupaten Jombang di akhir periode jangka menengah terpenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, ditandai dengan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat, ketahanan sosial, peningkatan kualitas kehidupan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan transformatif yang bersih dan melayani, efektif dan efisien, serta transparan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 harus mendukung tercapainya visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua”. Dalam rangka mewujudkan visi

pembangunan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan, maka misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

6. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berbudi Pekerti Luhur, Religius dan Berdaya Saing Global.** Misi ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Jombang yang mampu mendukung proses transformasi sosial yang inklusif, adaptif dan inovatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fokus dari penyelenggaraan misi ini adalah pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial lainnya, termasuk di dalamnya penurunan kemiskinan dan perlindungan masyarakat dari bencana.
7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan.** Misi ini diselenggarakan melalui diversifikasi ekonomi dan hilirisasi sumber daya ekonomi unggulan berbasis teknologi, meningkatkan kontribusi sektor strategis, penciptaan ekonomi kreatif, bisnis rintisan start up dan marketplace. Misi ini menekankan implementasi Ekonomi Hijau (green economy) yang berarti tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Konsepnya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam, yang antara lain diterapkan melalui pendekatan ekonomi sirkular yang menekankan nilai produk atau bahan selama mungkin untuk menekan limbah. Orientasi misi ini adalah integrasi sektor industri, perdagangan dengan sektor pertanian, penguatan investasi daerah dan meningkatnya ekonomi masyarakat yang ditandai berkembangnya koperasi, usaha mikro, ekonomi kreatif yang dapat memperkecil kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.
8. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.** Misi ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas dan berwawasan lingkungan, baik infrastruktur kawasan permukiman, pekerjaan umum maupun perhubungan. Arah pengembangan infrastruktur difokuskan pada; (1) pemenuhan infrastruktur wajib dasar; (2) kawasan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru; (3) pengembangan infrastruktur jalan yang berdampak pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Misi ini juga berfokus pada upaya-upaya menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sehingga diharapkan mampu memitigasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan rendahnya/menurunnya kualitas lingkungan hidup.

9. **Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal.** Misi ini diselenggarakan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman, nyaman dan menghargai perbedaan (harmoni sosial). Pembangunan ketahanan sosial, khususnya pada penciptaan masyarakat yang agamis, tertib, tentram dan terlindungi serta rukun menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini. Pembangunan budaya dan kesetaraan gender juga merupakan fokus lainnya dari misi ini.
10. **Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.** Transformasi tata kelola pemerintahan ini diselenggarakan melalui transformasi digital dan perluasan partisipasi publik. Fokus penyelenggaraan dari misi adalah pada perluasan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui digitalisasi atau optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalamnya. Selain itu, menciptakan kebijakan publik dan membangun perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, serta aparatur sipil negara yang profesional, juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 tersebut diharapkan menjawab semua isu strategis pembangunan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mendukung misi bupati yang ke 5 (lima) yaitu “**Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif**” dengan indikator **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Berbasis Digital**. Dalam rangka mendukung misi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis digital, Badan Pendapatan Daerah melalui **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** merancang rencana kerja yang berfokus pada transformasi digital dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan berbasis elektronik, termasuk integrasi layanan pajak daerah secara online, penerapan kanal pembayaran non-tunai, serta optimalisasi dashboard pemantauan realisasi PAD secara real-time. Selain itu, dilakukan pula penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan literasi digital bagi petugas pemungut pajak dan operator sistem. Melalui sinergi antar-perangkat daerah, Bapenda Jombang juga mendorong integrasi data perpajakan dengan instansi lain seperti DPMPTSP, Dukcapil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas PUPR untuk mendukung kebijakan satu data dan memperluas basis potensi penerimaan. Dengan langkah-langkah tersebut, Bapenda berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses administrasi, memperkuat

transparansi publik, dan secara langsung mendukung pencapaian visi pemerintahan berbasis digital yang modern dan responsif.

Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan strategi berupa program dan kegiatan, dengan indikator program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran sasaran yang hendak dicapai. Anggaran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 27.686.311.796,00 dengan rincian Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 8.891.194.351,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target 100%

Kegiatan Pada Program ini antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 778.365.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan Rp. 294.164.752.400,00
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 914.500.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan 697.000 OP
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 3.814.004.278,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang Diterima Terhadap Penetapan Rp. 294.164.752.400,00
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 150.315.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah Rp. 450.800.000.000,00

Sub Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 200.800.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak

Daerah 4 Dokumen

- b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 412.000.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan
- c. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 411.600.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan
- d. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 502.500.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 693.000 Dokumen
- e. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 300.000.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4000 Layanan
- f. Penagihan Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 3.514.004.278,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen
- g. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 266.250.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Dokumen
- h. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 150.315.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan

**B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 18.795.117.445,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur sipil negara
90%

Kegiatan Pada Program ini antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 27000.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Prosentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3
Dokumen

b. Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 12.000.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD 9 Laporan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 16.908.146.525,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi
Keuangan PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 16.468.029.525,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN 70 Orang/bulan

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan
SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 437.208.000,00

- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 2.909.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 220.812.030,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Prosentase Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian PD 100%
- Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :
- a. Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 59.255.400,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 87 paket
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 46.373.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 115.183.630,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 90 Orang
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.018.616.050,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum PD 100%
- Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 21.829.150,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor 1 Paket
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 559.032.600,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 1 Paket
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 10.025.100,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 Paket
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 227.695.700,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
1 Paket
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 56.574.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan
yang Disediakan 17 Paket
- f. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 11.760.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang – Undangan 48 Dokumen
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 131.699.500,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan konsultasi SKPD 9 Laporan
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Masukan : Jumlah Dana Rp. 460.748.932,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD

100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 230.520.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 230.228.932,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan

- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Masukan : Jumlah Dana Rp. 801.100.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 442.141.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 unit
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 158.325.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 200.634.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 unit

Dari uraian dan rincian tersebut diatas dapat di lihat pada tabel matriks rencana kerja dan Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025, berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	Bapenda	100%	8.891.194.351	APBD 2025
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Bapenda	Rp312.372.602.400	1.873.471.222	APBD 2025
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Bapenda	697.000 objek pajak	2.177.337.286	APBD 2025
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Bapenda	Rp312.372.602.400	4.791.656.218	APBD 2025
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Bapenda	Rp450.800.000.000	48.729.625	APBD 2025
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	4 dokumen	1.047.699.472	APBD 2025
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12 laporan	1.527.333.236	APBD 2025
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Bapenda	12 laporan	700.507.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	697.000 dokumen	650.004.050	APBD 2025
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	4.000 layanan	331.084.570	APBD 2025
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	4.460.571.648	APBD 2025
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	125.264.750	APBD 2025
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	12 laporan	48.729.625	APBD 2025

5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	Bapenda	90%	18.795.117.445	APBD 2025
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Bapenda	100%	15.809.000	APBD 2025
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Bapenda	3 dokumen	9.620.000	APBD 2025
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Bapenda	9 laporan	6.189.000	APBD 2025
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Bapenda	100%	15.469.737.114	APBD 2025
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	61 orang/bulan	15.043.648.114	APBD 2025
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	12 dokumen	424.512.000	APBD 2025
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1 laporan	1.577.000	APBD 2025
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Bapenda	100%	217.055.409	APBD 2025
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda	61 paket	22.655.400	APBD 2025
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Bapenda	3 orang	167.774.318	APBD 2025
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	90 orang	26.625.691	APBD 2025
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Bapenda	100%	1.610.932.394	APBD 2025
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	19 paket	21.829.150	APBD 2025
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	61 paket	1.182.353.644	APBD 2025
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	12 paket	14.638.700	APBD 2025

5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 paket	244.108.100	APBD 2025
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	11 paket	41.101.800	APBD 2025
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	24 dokumen	11.760.000	APBD 2025
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	9 laporan	95.141.000	APBD 2025
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	523.000.932	APBD 2025
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	309.520.000	APBD 2025
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	213.480.932	APBD 2025
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	958.582.596	APBD 2025
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	33 unit	261.320.000	APBD 2025
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	501.328.596	APBD 2025
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	15 unit	195.934.000	APBD 2025

Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang Pendapatan daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2025, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam rangka peningkatan dan pengelolaan Pendapatan Daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, akan tetapi juga sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Harapan kami, semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan Jombang Sejahtera untuk Semua.



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141

Telp. (0321) 873331

bapenda@jombangkab.go.id / bapenda.jombangkab.go.id